



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**RENJA**

**RENCANA  
KERJA**

**DPM-PTSP  
TAHUN 2023**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPM-PTSP)**

**Jl. Basuki Rahmad Nomor 23  
Kota Probolinggo**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya semata, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 ini telah tercermin dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah selesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 ini, oleh karenanya kami sangat berterimakasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PROBOLINGGO



**MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19740407 199311 1 001

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2024 dan pendanaannya menggunakan Renja K/L dan rancangan RKPD Provinsi sebagai bahan masukan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 );
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- m. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 bermaksud untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun prioritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023;
- b) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023;
- c) Mengevaluasi / mereview hasil kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo tahun sebelumnya;
- d) Mencari solusi / pemecahan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang;
- e) Sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun ke depan.

## **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I** Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2023

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2022 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	9 Dokumen	90%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	9 Dokumen	90%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>80%</b>	<b>117%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	37 Orang	-	-
		Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	75%	100%	100%	100%	-	91,60%	-
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	183 Dokumen	-	-
		Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	80%	160%	100%	100%	100%	-	120%	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	25 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>80%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	80%	80,00%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	93%	93%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan	-	-	200 set	200 set	100%	200 set	200 set	100%

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>126%</b>	<b>126%</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	126%	126%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang terpenuhi	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	126%	126%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	126%	126%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	80%	94%	-	-	-	-	-	110%	110%
		Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	-	-	50 buah	50 buah	100%	60 Buah	100%	100%	100%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	80%	80%	80%	80%	100%	85%	87%	87%	102%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	80%	80%	80%	80%	100%	85%	82%	82%	96%
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	93%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	80 Unit	80 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	35 Unit	48 Unit	48 Unit	137%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase ketatalaksanaan tepat waktu</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
		<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>80,00%</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	87%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	87%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	87%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpenuhi</b>	<b>80%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	93%	93%	93%
		<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	80%	80%	100%	100%	100%	-	93%	93%	93%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	-	-	-	35 unit	-	-	-

	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	87%	87%	100%	100%	100%	100%	96%	96%
			Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Mebel	Perentase Mebel yang terpelihara	80%	80%	-	-	-	-	28%	28%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	-	-	-	-	-	186 Unit	-	-
			Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	87%	87%	100%	100%	100%	-	96%	96%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	100%	-	-
			Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	87%	87%	100%	0%	0%	-	29%	29%
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-
			<b>Persentase pertumbuhan nilai investasi</b>	-	-	<b>0,39%</b>	<b>0,38%</b>	<b>97,44%</b>	<b>0,40%</b>	<b>33,59%</b>	<b>84%</b>
		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia	100%	100%	1 potensi	1 potensi	100%	1 Potensi	100%	100%
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	100%
		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-
			<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
			Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	-	-	-	-	-	1 kali	100%	100%
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ijin yang terbit tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>145%</b>	<b>145%</b>	<b>100%</b>		
		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>a. jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen ; b. jumlah usaha yang tekah difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>145%</b>	-	-	-
			<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan	750 Izin	750 Izin	800 Izin	2237 Izin	279%	850 Izin	1279	150%
	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen	160 Izin	160 Izin	750 Izin	819 Izin	109%	750 Izin	576 Izin	77%
	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	25 Jenis Pengaduan	25 Jenis Pengaduan	5 Jenis Pengaduan	4 Jenis Pengaduan	80%	7 Jenis Pengaduan	90%	90%

	4 Koordinasi dan Sinkronisasi · Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi	160 Pemohon	160 Pemohon	50 Pemohon	50 Pemohon	100%	50 pemohon	100%	100%
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>7 kali</b>	<b>7 kali</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan yang Dilaksanakan	3 kali	3 Kali	500 Pelaku Usaha	752 Pelaku Usaha	150%	325 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	111%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	3 kali	3 Kali	-	-	-	-	-	-
		jumlah bidang usaha (KBLI)	-	-	16 KBLI	30 KBLI	187%	16 KBLI	16 KBLI	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang Dipromosikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan</b>	<b>750 Data</b>	<b>750 Data</b>	<b>750 Data</b>	<b>750 Data</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-
		<b>persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	100%	100%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi	750 Data	750 Data	750 Data	750 Data	100%	-	-	-
		jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia	-	-	-	-	-	750 Data	750 Data	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tanga Kerja sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Adapun hasil analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Probolinggo**

No.	Indikator (IKU OPD)	SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	-	-	0,37%	0,38%	0,39%	0,4%	0,37%	0,38%			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	82,25%	82,50%	82,75%	83%	83,25%	83,36%			

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

### **PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS :**

#### **Urusan Penanaman Modal**

1. Potensi dan peluang potensi penanaman modal belum terinventarisasi secara lengkap dan komunikatif. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal belum di review;
  - b. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi peluang penanaman modal;
  - c. Belum adanya prospectus investasi.
2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan masih banyak kendala dalam proses penyelesaiannya. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya :
  - a. Lambatnya pertimbangan teknis dari dinas teknis terkait;
  - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian IMB baik dalam hal cek lokasi lapangan, penerbitan izin dan petugas yang memahami teknis (SDM belum tersertifikasi).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi perizinan online. Faktor faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang belum siap dalam melaksanakan teknologi informasi;
4. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Si-Cantik Cloud yang terus mengalami pengembangan;

5. NSPK pada aplikasi OSS masing – masing kementerian sering berubah;
6. Fasilitas sarana dan prasarana di MPP belum lengkap (Help Desk, Telepon antar Counter, Wi – Fi)

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo menetapkan program prioritas sebagai berikut :

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2023	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2023	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>100</b>	<b>6.509.157.551,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>100</b>	<b>6.509.157.551,00</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>100</b>	<b>109.548.500,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>100</b>	<b>109.548.500,00</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	40.687.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	40.687.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	68.861.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	68.861.500,00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>4.362.376.651,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>4.362.376.651,00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.209.628.151,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.209.628.151,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183 Dokumen	141.993.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183 Dokumen	141.993.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	25 Laporan	10.755.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	25 Laporan	10.755.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>47.675.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>47.675.000,00</b>	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	32.975.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	32.975.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	14.700.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	14.700.000,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>579.543.900,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>579.543.900,00</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	66.359.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	66.359.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	6 Paket	13.877.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	13.877.400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	7.150.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	7.150.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	204.940.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	204.940.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	9.787.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	9.787.500,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	269.430.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	269.430.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>152.895.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>152.895.000,00</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	166 Unit	152.895.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	166 Unit	152.895.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>948.985.250,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>948.985.250,00</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.411.750,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.411.750,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	525.573.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	525.573.500,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>293.633.250,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>293.633.250,00</b>	



	<b>Daerah</b>					<b>Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	97.955.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	97.955.750,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	125.677.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	125.677.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000,00	
2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang dipromosikan</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang dipromosikan</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	<b>Kota Probolinggo</b>	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.290.000,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	<b>Kota Probolinggo</b>	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.290.000,00	
3.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	<b>Kota Probolinggo</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.710.000,00	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	<b>Kota Probolinggo</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.710.000,00	
4.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Ijin yang terbit tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>268.836.000,00</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Ijin yang terbit tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>268.836.000,00</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>100</b>	<b>268.834.000,00</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>100</b>	<b>268.834.000,00</b>	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	164.750.500,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	164.750.500,00	

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 Kegiatan Usaha	88.685.500,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 Kegiatan Usaha	88.685.500,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60 Orang	1.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60 Orang	1.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	50 Kegiatan Usaha	14.400.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	50 Kegiatan Usaha	14.400.000,00	
5.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan Usaha	339.300.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan Usaha	339.300.000,00	
6.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Dipublikasikan</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Dipublikasikan</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	78 Dokumen	54.065.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	78 Dokumen	54.065.000,00	
<b>Jumlah</b>					<b>7.311.358.551,00</b>	<b>Jumlah</b>					<b>7.311.358.551,00</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2023 Walikota Probolinggo mempunyai tema pembangunan yaitu **“Percepatan Produktivitas Sektor Unggulan Kota Probolinggo Yang Mendukung Petumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Probolinggo mengampu 2 (dua) Misi Pembangunan Kota Probolinggo yaitu :

1. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial;
2. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo dalam mendukung Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN
1	Peningkatan kemandirian masyarakat sebagai upaya percepatan sektor ekonomi produktif	Meningkatkan daya tarik dan iklim penanaman modal melalui kebijakan Investasi	1. Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal; 2. Program Promosi Penanaman Modal; 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 4. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Melakukan pemetaan peluang potensi investasi - Meningkatkan pemantauan kinerja penanaman modal - Meningkatkan promosi investasi - Meningkatkan penyebaran informasi penanaman modal
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban serta efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan public yang inovatif, cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas	1. Program Pelayanan Perizinan 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	- Mengoptimalkan fasilitas pelayanan pada sarana dan prasaran Mal Pelayanan Publik - Mengoptimalkan pelaksanaan perizinan online (pengoptimalan SI CANTIK CLOUD) - Memberikan pendampingan OSS

Selain program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo untuk perencanaan pembangunan juga mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari bawah / masyarakat (bottom up).

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo**

No.	Program/Kegiatan Tahun 2023	Nama dan Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	<b>NIHIL</b>			

### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005–2025, Rencana Panjang Jangka Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020-2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selain itu juga dengan terbitnya undang undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas ekonomi masyarakat terutama umkm dan pelayanan perizinan di daerah dengan pelaksanaan PP 5 tahun 2021 tentang OSS RBA dimana system perizinan sudah terintegrasi pusat dan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020-2024 yaitu :

#### I. ARAH KEBIJAKAN PERTAMA :

Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### II. ARAH KEBIJAKAN KEDUA

Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta berkelanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal;
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar;
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;

- f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

## **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **3.2.1 TUJUAN**

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo tetap konsisten dengan tujuan yang dikembangkan dalam periode tersebut. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo yaitu :

- a. Meningkatnya nilai investasi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public pemerintahan;

Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 - 2024 dan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan.

### **3.2.2 SASARAN**

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir ( 2019 - 2024 ), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peluang investasi daerah;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan public pemerintahan.

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan oleh OPD dalam Renstra OPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, disampaikan ke Organisasi Pemerintah Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Organisasi Pemerintah Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel T-C.33.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo merumuskan 2 (dua) urusan, 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (Dua puluh sembilan) sub kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar **Rp.7.311.358.551,00** dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF)

#### **4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : DPMTSP KOTA PROBOLINGGO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>6.509.157.551,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>14.730.347.794,80</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>109.548.500,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>109.548.500,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	10 Dokumen	40.687.000,00	DAU		10 Dokumen	40.687.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	10 Dokumen	68.861.500,00	DAU		10 Dokumen	68.861.500,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>4.362.376.651,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>4.362.376.651,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	37 Orang/bulan	4.209.628.151,00	DAU		37Orang/ bulan	4.209.628.151,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	183 Dokumen	141.993.500,00	DAU		183 Dokumen	141.993.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	25 Laporan	10.755.000,00	DAU		25 Laporan	10.755.000,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>47.675.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>1.320.000,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Probolinggo	3 Paket	32.975.000,00	DAU		3 Paket	32.975.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	2 Dokumen	14.700.000,00	DAU		2 Dokumen	14.700.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>579.543.900,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>571.009.054,00</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Paket	66.359.000,00	DAU		12 Paket	66.359.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	6 Paket	13.877.400,00	DAU		6 Paket	13.877.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	72 Dokumen	7.150.000,00	DAU		72 Dokumen	7.150.000,00



			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6 Laporan	6.000.000,00	DAU		6 Laporan	6.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	50 Laporan	204.940.000,00	DAU		50 Laporan	204.940.000,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	100 Dokumen	9.787.500,00	DAU		100 Dokumen	9.787.500,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	12 Dokumen	269.430.000,00	DAU		12 Dokumen	269.430.000,00
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>152.895.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>152.895.000,00</b>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	166 Unit	152.895.000,00	DAU		166 Unit	152.895.000,00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>948.985.250,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>948.985.250,00</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Laporan	423.411.750,00	DAU		12 Laporan	423.411.750,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	18 Laporan	525.573.500,00	DAU		18 Laporan	525.573.500,00
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>293.633.250,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>293.633.250,00</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	16 Unit	97.955.750,00	DAU		16 Unit	97.955.750,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	186 Unit	125.677.500,00	DAU		186 Unit	125.677.500,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	3 Unit	70.000.000,00	DAU		3 Unit	70.000.000,00
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang dipromosikan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>102.290.000,00</b>
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	102.290.000,00	DAU		1 Dokumen	102.290.000,00
			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>
			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan promosi penanaman modal</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>37.710.000,00</b>
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	37.710.000,00	DAU		1 Dokumen	37.710.000,00
			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ijin yang terbit tepat waktu</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>268.836.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>268.836.000,00</b>
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>268.834.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>268.834.000,00</b>

			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Probolinggo	2700 Pelaku Usaha	164.750.500,00	DAU		2700 Pelaku Usaha	164.750.500,00	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Probolinggo	750 Kegiatan Usaha	88.685.500,00	DAU		750 Kegiatan Usaha	88.685.500,00	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Probolinggo	60 Orang	1.000.000,00	DAU		60 Orang	1.000.000,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Probolinggo	50 Kegiatan Usaha	14.400.000,00	DAU		50 Kegiatan Usaha	14.400.000,00	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	<b>DAU, DAKNF</b>		<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	
			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pengawasan penanaman modal</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>339.300.000,00</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Probolinggo	50 Kegiatan Usaha	339.300.000,00	DAU		50 Kegiatan Usaha	339.300.000,00	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi PM</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	
			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Dipublikasikan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>54.065.500,00</b>	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Probolinggo	78 Dokumen	54.065.000,00	DAU		78 Dokumen	54.065.000,00	
<b>Total</b>								<b>7.311.358.551,00</b>		<b>-</b>	<b>Total</b>	<b>7.311.358.551,00</b>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisah dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Tahun 2023 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.